

COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MODEL PADA PROGRAM GERBANG CAHAYAKU DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

DHITA AMELIA KURNIA¹, DARTO MIRADHIA²
Universitas Padjadjaran^{1,2}
email : dhita20004@mail.unpad.a.id

ABSTRACT

The development paradigm shift has now developed towards human-based development by focusing on community participation. This is based on the belief that the community knows best what they need. This study aims to describe the application of the Community Driven Development model in the Gerbang Cahayaku programme implemented in Tanjungsari Village, Karangpawitan District, Garut Regency. The analysis was conducted using three important aspects that are specific characteristics in this model, namely decentralisation, democratisation, and collective action. The research method used is descriptive qualitative to produce a description of the factual issues raised systematically.

The results showed that in general the implementation of Gerbang Cahayaku carried out in Tanjungsari Village has fulfilled the three main aspects that characterise the Community Driven Development model. Decentralisation relates to the transfer of authority from Disperkim to Community Self-Help Group to manage development activities, from planning, implementation, to supervision. Democratisation relates to the implementation of local governance and participatory decision-making process by involving the community. Finally, collective action relates to community mobilisation that occurs inclusively to be directly involved in all stages of development activities.

Key Words: *The development of villages, community driven development, decentralization, democratization, collective action*

ABSTRAK

Pergeseran paradigma pembangunan kini telah berkembang ke arah pembangunan berbasis manusia dengan berfokus pada partisipasi masyarakat. Hal ini didasarkan keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan model Community Driven Development (CDD) pada program Gerbang Cahayaku yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga aspek penting yang menjadi karakteristik khusus dalam model ini, yakni desentralisasi, demokratisasi, dan aksi kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menghasilkan gambaran mengenai permasalahan faktual yang diangkat secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Gerbang Cahayaku yang dilakukan di Desa Tanjungsari telah memenuhi ketiga aspek utama yang menjadi karakteristik model CDD. Desentralisasi berkaitan dengan penyerahan wewenang dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengelola kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kemudian demokratisasi berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola lokal dan proses pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Terakhir, aksi kolektif berkaitan dengan mobilisasi masyarakat yang terjadi secara inklusif untuk dapat terlibat langsung dalam seluruh tahap pada kegiatan pembangunan.

Kata Kunci: *pembangunan desa, community driven development, desentralisasi, demokratisasi, aksi kolektif.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pembangunan tengah dilihat sebagai isu krusial yang selalu menjadi fokus perhatian pemerintah di berbagai level. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan yang dijalankan tidak lagi hanya berkutat pada pembangunan yang bersifat nasional, melainkan juga pembangunan di tingkat daerah sehingga dapat mendorong kemandirian setiap daerah untuk menyelesaikan masalah serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain pembangunan daerah, di Indonesia juga berkembang konsep pembangunan desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Sebagai suatu upaya yang berkesinambungan, pembangunan di tingkat desa menjadi salah satu kunci untuk mencapai sasaran pembangunan yang inklusif dan merata di semua wilayah.

Dalam tataran konseptual, pembangunan desa dipandang sebagai perubahan ganda di mana perubahan ini tidak hanya mengutamakan target yang hendak dicapai, melainkan juga pada proses adaptasi yang terus terjadi selama ada perubahan dari pembangunan itu sendiri. Dalam prosesnya, pembangunan desa perlu berfokus pada isu-isu seperti kemandirian; partisipasi; demokrasi; pemberdayaan; dan gerakan lokal yang secara keseluruhan pada akhirnya menciptakan desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan meliputi seluruh proses mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini seperti pendapat Chambers tentang paradigma baru pembangunan yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* [1] dan ungkapan Conyers yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai sasaran pembangunan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan di lapangan [2]. Di samping itu, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga merupakan suatu hak demokrasi yang juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada program yang dijalankan.

Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, penggunaan model pembangunan berbasis masyarakat dalam program-program pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia telah dilakukan selama hampir dua dekade. Beberapa program pemerintah seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam hal ini bantuan yang diberikan

pemerintah dinilai bukan sebagai aspek utama pembangunan desa, melainkan hanya sebagai stimulan untuk terciptanya swadaya serta gotong royong di antara masyarakat desa.

Dalam rangka mewujudkan misi ke-3 kepala daerah Kabupaten Garut, yakni pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut menggagas beberapa program, yang salah satunya diberi nama Gerakan Membangun dan Mencegah Permukiman Rawan Kumuh (Gerbang Cahayaku). Program ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Garut yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti bertambahnya permukiman kumuh. Gerbang Cahayaku sendiri merupakan program kolaborasi atas replikasi dari Kotaku yang menjadi perwujudan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam rangka pencegahan meluasnya kawasan permukiman kumuh. Program ini dilaksanakan dengan metode Swakelola Tipe IV di mana mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat setempat.

Salah satu desa di Kabupaten Garut yang terpilih dan telah merealisasikan Program Gerbang Cahayaku adalah Desa Tanjungsari yang terletak di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaannya, Program Gerbang Cahayaku di Desa Tanjungsari dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga pimpinan kolektif yang menjadi motor penggerak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Dari sudut pandang administrasi pembangunan, adanya peran BKM dalam Program Gerbang Cahayaku merupakan wujud salah satu model pembangunan desa yang diperkenalkan Kementerian Perdesaan, yakni *“Community Driven Development Model”* (CDD Model). Model CDD adalah sebuah bentuk pembangunan melalui program yang dirancang untuk menghimpun inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan berfokus pada berbagai upaya terorganisir dengan pola pembangunan yang melibatkan tindakan berbasis masyarakat dan prosesnya. Sejalan dengan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan model *Community Driven Development* (CDD) pada Program Gerbang Cahayaku yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Desa

Berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Desa dalam tinjauan historis sudah ada bahkan jauh sebelum NKRI secara resmi terbentuk. Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang diakui dan juga menjadi ujung tombak pembangunan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sebagai suatu upaya yang berkesinambungan, pembangunan di tingkat desa menjadi salah satu kunci untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang inklusif dan merata di semua wilayah. Perlu digaris bawahi bahwa pemerataan di sini tidak melulu setiap desa memiliki indikator yang sama, melainkan desa dapat memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing untuk menunjang keseluruhan proses pembangunan. Ini dikarenakan adanya keberagaman karakteristik dan jenis desa yang ada di Indonesia menjadi tantangan dan potensi tersendiri bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan nasional.

Seperti halnya proses pembangunan pada umumnya, pembangunan desa juga berdasar pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola dan keberlanjutan sebagai aspek fundamental di dalamnya [3]. Hal ini karena sejatinya pembangunan desa merupakan sebuah penyelenggaraan proses perubahan terencana yang bersifat multi-aspek. Pembangunan desa merupakan suatu proses di mana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut [4]. Dengan begitu, nampak bahwa pada dasarnya pembangunan desa memiliki penekanan utama pada prakarsa dan swadaya masyarakat sebagai faktor kuncinya, sedangkan pemerintah hanyalah berperan sebagai pembimbing; pengawas; serta mendorong masyarakat untuk memelihara; menumbuhkan; dan mengembangkan prakarsa swadaya, serta inisiatif masyarakat melalui bantuan materiil maupun non-materiil.

2. *People Centered Development*

Portes melihat pembangunan sebagai sebuah bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya [5]. Dalam hal ini, pembangunan merujuk pada proses perubahan terencana yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan pendapat Beratha yang menerangkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik dengan berdasar pada norma-norma tertentu [6].

Seiring pergeseran zaman, model pembangunan sebagai kerangka acuan kerja di dalamnya terus mengalami perkembangan, baik dari segi konsep maupun praktik. Saat ini, terdapat sebuah istilah yang banyak diusung terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yakni "pembangunan partisipatif" atau "pembangunan yang berorientasi pada manusia" atau "*people-centered paradigm*". Korten menerangkan bahwa "*The logic of a people-centered development approach dictates an emphasis on more effective use of those physical and financial resources that already are available, by changing the ways they are controlled and managed*" [7].

Menurut Chin Saik Yoon dalam UNDP, pendekatan partisipatif dalam pengembangan komunitas mulai dikenal sejak tahun 1970-an [8]. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya kritik atas paradigma model kebutuhan dasar (*basic needs model*) yang dinilai menimbulkan bias atau distorsi terhadap konsep pembangunan itu sendiri. Di samping itu, adanya ketergantungan masyarakat terhadap program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lama kelamaan dapat mematikan kreativitas dan inisiatif masyarakat untuk melakukan pembangunan. Masyarakat menjadi objek "eksistensialisme" pasif yang sepenuhnya mengandalkan pemerintah untuk melakukan pembangunan. Di lain sisi, pemerintah juga memiliki berbagai keterbatasan. Di samping itu, asumsi dasar paradigma baru ini juga melihat manusia sebagai kunci dalam pembangunan yang berpotensi mendorong kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial. Maka dari itu, paradigma baru ini mulai menggeser pandangan lama dengan menjadikan manusia (masyarakat) menjadi subjek aktif yang harus bisa menentukan sendiri arah dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Korten & Klauss yang menyatakan "*People-centered development favors the organizational models of selforganizing systems, which operate in a more organic fashion*" [9].

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal penting, yakni ketika pembangunan itu diletakkan atas dasar keyakinan bahwa mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan [10]. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sosial, menyebabkan munculnya dorongan untuk melakukan upaya perubahan dalam kehidupan masyarakat [11].

3. Community Driven Development Model

Pada awal tahun 2000-an, lahir sebuah model pembangunan partisipatif yang dikenal dengan *Community Driven Development* (CDD). Dasgupta & Beard menyebutkan bahwa, "*Community driven development is part of a broader paradigm shift responding to the well-documented critiques of top-down, modernist and authoritarian approaches that have dominated development over the last fifty years*" [12]. CDD sendiri adalah sebuah pendekatan dalam konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan inisiatif masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelaku atau pengelola. Hal tersebut sejalan pula dengan penuturan Wong & Guggenheim, yang menyatakan "*Community driven development projects aim to influence and strengthen local governance, with the intention that the participatory approach will spill over into broader decision-making processes at the community level*" [13].

Dongier menjelaskan apabila CDD dilakukan melalui upaya untuk memperkuat serta memberikan pendanaan, memfasilitasi akses terhadap informasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan [14]. Oleh karena itu, pada model ini ditekankan adanya kelompok kerja pada masyarakat yang berperan sebagai motor penggerak atas aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Menurut World Bank CDD memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya:

- a. Pelaksanaan CDD melibatkan organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
- b. Organisasi atau lembaga kemasyarakatan bertanggungjawab dalam merencanakan proyek secara partisipatif.
- c. Karakteristik utama proyek CDD adalah pemberdayaan masyarakat.
- d. Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.
- e. Unsur pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan berbasis masyarakat [15].

Pada dasarnya, CDD merupakan bagian dari perubahan paradigma yang lebih luas sebagai respon terhadap kritik atas pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik, top-down, modernis, dan otoriter. Dasgupta & Beard mengungkapkan bahwa pergeseran ini didasari oleh tiga proposisi dalam literatur, yang terdiri dari:

- a. Kemampuan desentralisasi untuk mengurangi inefisiensi pembangunan yang terpusat dan dikendalikan oleh negara.
- b. Adanya pandangan bahwa pengalihan fokus pengambilan keputusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke masyarakat akan mendorong demokratisasi.
- c. Hasil yang dijanjikan oleh dua proposisi sebelumnya lebih mungkin terjadi pada masyarakat dengan kapasitas yang kuat untuk melakukan tindakan kolektif [12].

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian, yakni untuk menjelaskan proses pada fenomena sosial tertentu secara sistematis melalui pemikiran yang holistik [16][17]. Kemudian penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu kenyataan berdasarkan objek dan data yang diteliti, yang berasal dari sumber-sumber seperti naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya [17].

Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran mengenai permasalahan faktual yang diangkat secara sistematis. Penggunaan metode ini sejalan dengan tujuan penelitian, yakni untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara menggambarkan penerapan Model *Community Driven Development* pada Program Gerbang Cahayaku di Desa Tanjungsari secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini juga menggunakan desain penelitian studi kasus untuk mengembangkan analisis mendalam tentang suatu fenomena yang menarik [17]. Kasus yang diangkat dibatasi waktu dan aktivitas tertentu.

Untuk memperlihatkan aliran peristiwa secara kronologis serta cenderung mengarah pada temuan dan integrasi baru untuk menghasilkan atau merevisi kerangka kerja konseptual, digunakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder [18][19]. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui beberapa cara, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumen). Selanjutnya data yang terkumpul diolah menggunakan teknik analisis data dengan tahapan yang terdiri dari *data reduction/ condensation; data display; dan conclusion drawing/verification* [20] [19].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Community Driven Development* (CDD) merupakan suatu modalitas perancangan dan pelaksanaan proyek yang mentransfer kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta seringkali sumber daya keuangan dan teknis secara langsung ke masyarakat atau kelompok pengguna akhir. Model ini mengkonsentrasikan pengambilan keputusan dan kekuasaan pengelolaan secara lokal, di dalam masyarakat, diusulkan sebagai cara untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, sekaligus mengatasi kelemahan negara dalam pemberian layanan dengan memanfaatkan modal sosial. Penggunaan pendekatan partisipatif dalam model CDD memberikan peluang bagi masyarakat untuk

melakukan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri [21]. Oleh karena itu, CDD kerap kali digunakan dalam memberikan layanan dasar, membangun dan memelihara barang-barang publik dan infrastruktur lokal, mengelola sumber daya milik bersama, serta merencanakan dan mengelola anggaran masyarakat.

Secara umum ciri CDD mencakup pembentukan komite lokal untuk mengelola proses atau proyek serta adanya sumbangan masyarakat baik dalam bentuk uang maupun tenaga kerja. Setelah itu komite lokal tersebut akan mendapat sejumlah kewenangan dari pemegang kekuasaan (pemerintah) untuk dapat menggerakkan masyarakat sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dasgupta & Beard tentang tiga aspek yang mendasari CDD, yakni desentralisasi (*decentralization*), demokratisasi (*democratization*), dan aksi kolektif (*collective action*) [12].

Desentralisasi

Dalam tataran pemerintahan Indonesia, desentralisasi berarti penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Pelaksanaan desentralisasi ini kemudian menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam proses pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat daerah [22]. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Daerah Kabupaten Garut memiliki misi berupa pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman. Untuk mewujudkan misi ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garur menggagas berbagai program, yang salah satunya diberi nama Gerakan Membangun dan Mencegah Permukiman Rawan Kumuh (Gerbang Cahayaku). Program ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024 serta Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023.

Gerbang Cahayaku merupakan sebuah program kolaborasi dan perwujudan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat dalam rangka pencegahan meluasnya kawasan permukiman kumuh. Pemilihan lokasi untuk merealisasikan Program Gerbang Cahayaku menerapkan indikator kekumuhan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dan Keputusan Bupati Nomor 100/kep,175-Disperkim/2017 tentang Penetapan Pusat Pemerintah Kecamatan sebagai Lokasi Penataan dan Peningkatan Perumahan dan Permukiman. Di samping itu, menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Disperkim Kabupaten Garut, di luar indikator kumuh yang dibatasi oleh peraturan tersebut, terdapat aspek lain yang menjadi pertimbangan, seperti adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan serta kapasitas kelembagaan masyarakat yang mumpuni. Mengacu pada beberapa pertimbangan tersebut, maka lokasi yang terpilih untuk merealisasikan Program Gerbang Cahayaku terletak di RW 05, Dusun Cireundeu, Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan.

Program pembangunan dengan model CDD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan stimulan investasi dan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan program di tangan masyarakat. Oleh karena itu, garis kewenangan pada program CDD bersifat desentralisasi di mana kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan diserahkan pada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai kapasitasnya. Dalam pendekatan CDD, desentralisasi merujuk pada penunjukkan tata kelola lokal di tingkat masyarakat yang disertai wewenang untuk mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

Dalam pelaksanaannya, Program Gerbang Cahayaku mengusung konsep Swakelola Tipe IV dengan mereplikasi program Kotaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Swakelola Tipe IV ini, masyarakat diharapkan dapat belajar untuk mengelola seluruh kegiatan pembangunan dari awal hingga akhir. Di samping itu, salah satu tujuan lain dari Swakelola tipe ini juga agar masyarakat mempunyai rasa kepemilikan atas barang/jasa yang dihadirkan, yang dalam hal ini adalah berupa produk pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan, diperlukan adanya kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengelola program mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Untuk itu, Pemerintah Daerah selaku pihak yang mengeluarkan program mengamanatkan kepada BKM sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan berbentuk paguyuban dengan kedudukan di tingkat desa atau kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat [23][24]. BKM didesain sebagai institusi yang bersifat sukarela dan tanpa campur tangan pemerintah [11] sebagai lembaga kolektif yang berperan sebagai mediator atau fasilitator yang dapat menggerakkan masyarakat.

Pada saat mendengar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meluncurkan Program Gerbang Cahayaku, BKM Desa Tanjungsari berinisiatif untuk mengajukan proposal

perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa Tanjungsari. Selanjutnya pengajuan ini ditindaklanjuti oleh Disperkim untuk diverifikasi dengan melakukan penilaian terhadap sejumlah aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses verifikasi ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung lokasi yang diajukan sehingga penilaian lebih objektif.

Setelah memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan, kemudian Disperkim Kabupaten menyerahkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) mengenai Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha Tahun Anggaran 2022 kepada pihak BKM Desa Tanjungsari. Apabila BKM Desa Tanjungsari bersedia untuk memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam RKS tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak Disperkim melakukan penandatanganan Kontrak Swakelola dengan Koordinator BKM Desa Tanjungsari. Total harga atau nilai Kontrak Program Gerbang Cahayaku termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 486.669.200. Untuk pembiayaan Program Gerbang Cahayaku sendiri berasal dari APBD dengan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Bupati Garut Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Proses penganggaran dilakukan sesuai kebutuhan untuk kemudian diserahkan ke pihak Disperkim. Lalu untuk pencairan dana sendiri dilakukan dengan sistem 60-40, atau pemberian uang muka di awal sebesar 60% dan pencairan tahap dua sisanya yang 40% dilakukan mengikuti laporan progres yang diberikan pelaksana.

Sebagaimana hak dan kewajiban yang tertera pada Kontrak Swakelola, pihak Disperkim dan BKM terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan selama proses pembangunan berlangsung. Komunikasi dan koordinasi ini berlangsung baik secara formal seperti dalam bentuk pengajuan laporan progress, maupun pertemuan nonformal. Dalam pelaksanaannya, PPK juga kerap melakukan monitoring secara langsung ke lapangan minimal seminggu sekali. Di samping itu, Disperkim juga membentuk tim pengawas khusus untuk melakukan monitoring sekaligus evaluasi program secara keseluruhan. Monitoring yang dilakukan oleh tim pengawas khusus dilakukan minimal sebulan sekali dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana progres yang telah rampung serta menjaga kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan. Namun, setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai, tidak ada lagi komunikasi dan koordinasi lebih lanjut antara BKM Desa Tanjungsari dengan pihak Disperkim Kabupaten Garut. Walaupun sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab masyarakat, tentunya hal ini cukup patut untuk disayangkan. Padahal pemerintah dapat

tetap melakukan pengecekan sesekali untuk melihat bagaimana pemeliharaan yang dilakukan masyarakat terhadap produk pembangunan.

Selain dengan pihak Disperkim, BKM juga memfasilitasi koordinasi dengan pihak lain seperti Pemerintah Desa dan masyarakat. Meskipun Pemerintah Desa tidak terlibat secara langsung dalam Program Gerbang Cahayaku, namun mereka tetap turut mengambil peran sebagai pengawas sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dapat terjamin bagi masyarakat. Akan tetapi, komunikasi dan koordinasi yang terjadi dengan pihak Pemerintah Desa hanya berlangsung secara nonformal saja. Menurut penuturan Sekretaris Desa Tanjungsari, tidak ada laporan tertulis yang diserahkan pihak BKM maupun Tim Pelaksana baik saat pelaksanaan atau bahkan pasca selesainya pelaksanaan.

Demokratisasi

Di samping digunakan untuk menyediakan pelayanan publik baik berupa barang maupun jasa, evolusi program CDD kini merujuk pula pada tujuan pembangunan kelembagaan seperti meningkatkan modal sosial atau tata kelola lokal melalui penerapan kerangka pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan inklusif [25]. Tatanan sosial yang bersifat demokratis merupakan karakteristik utama desa. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek yang perlu dicapai dalam program CDD adalah kapasitas dan tata kelola lokal yang kuat yang nampak dari pembuatan struktur kelembagaan di tingkat masyarakat. CDD mensyaratkan adanya sebuah kelembagaan lokal yang terlibat penuh dalam keseluruhan aktivitas program [26]. Hal ini sebagaimana salah satu karakteristik program CDD yang dikemukakan oleh World Bank, bahwa kegiatan pada program CDD dilaksanakan melalui organisasi berbasis masyarakat atau lokal yang bertanggung jawab untuk merancang dan merencanakan subproyek secara partisipatif [15].

Pada tahap perencanaan, kegiatan dimulai dengan menyusun proposal kegiatan skala lingkungan yang berisi daftar usulan kebutuhan beserta rincian biaya yang dibutuhkannya. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini sendiri sangatlah penting. Penyusunan proposal dilakukan dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan skala prioritas. Usulan yang diajukan merupakan hasil Rembug Kawasan Prioritas yang sebelumnya telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Tanjungsari pada awal tahun 2022. Dengan begitu, semua hal yang

diajukan kepada Disperkim benar-benar merupakan hasil mufakat masyarakat yang juga telah divalidasi oleh BKM berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Selanjutnya, pada tingkat pelaksana dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab sebagai pengelola Program Gerbang Cahayaku yang penetapannya dilakukan melalui musyawarah secara demokratis. Penyelenggaraan musyawarah ini difasilitasi oleh BKM Desa Tanjungsari selaku inisiator dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, serta masyarakat desa pada umumnya. Orang-orang yang tergabung dalam tim pelaksana adalah para sukarelawan yang dinilai bijak, transparan, dan akuntabel untuk diamanahi oleh masyarakat dalam mengkoordinir proses pembangunan. Ini dilakukan agar nantinya proses pembangunan benar-benar berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir kelompok elit saja. Tim pelaksana Program Gerbang Cahayaku diberinama SINAR dengan berisikan sebanyak 12 orang. Secara struktural, tim ini terdiri dari ketua tim, sekretaris, bendahara, tim perencana, tim pelaksana, serta tim pengawas.

Dalam melaksanakan Program Gerbang Cahayaku, Tim Sinar mengalami sejumlah tantangan yang datang dari berbagai aspek khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang dinilai masih minim baik secara kuantitas maupun kualitas. Tantangan ini memberikan dampak cukup nyata, yang juga tidak dapat dipungkiri dapat membatasi kemampuannya untuk mengeksekusi program tersebut secara optimal dalam jangka waktu yang terbatas. Tantangan pertama dari segi kuantitas, nampak dari jumlah sumber daya manusia yang masih belum mencukupi untuk menangani kompleksitas program ini. Setiap tim yang dibentuk mulai dari bagian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan tentunya telah diberi tupoksi masing-masing. Akan tetapi, dalam kenyataannya pembagian kerja di lapangan dikembalikan lagi pada kebutuhan. Hal ini dikarenakan memang pada dasarnya setiap anggota tim yang berasal dari sukarelawan ini memiliki pekerjaan tetap dan kesibukan masing-masing sehingga tidak jarang mereka terkendala untuk turun secara langsung ke lapangan. Maka dari itu, semua anggota tim harus mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja yang memerlukan banyak improvisasi di lapangan.

Meskipun setiap anggota tim memiliki keterbatasan masing-masing, akan tetapi kondisi tersebut yang justru membuat mereka pada akhirnya mau tidak mau harus mengandalkan satu sama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Sinar juga menerapkan strategi dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era digital sekarang ini, Tim Sinar merasa media komunikasi dan koordinasi sudah sangat fleksibel sehingga bisa dilakukan

kapan saja dan di mana saja tanpa melakukan pertemuan secara tatap muka. Biasanya, setiap progres pekerjaan yang berhasil dicapai akan dilaporkan melalui grup 'WhatsApp' sehingga semua orang bisa langsung mengetahuinya. Begitupun ketika ada salah seorang yang tidak bisa mengerjakan tupoksinya karena mengalami kendala, maka akan langsung dilaporkan di grup agar nantinya bisa saling mem-back up.

Selanjutnya tantangan lainnya berasal dari segi kualitas sumber daya manusia yang dapat dikatakan masih terbatas. Tim Sinar yang berisikan anggota BKM Desa Tanjungsari merupakan orang-orang pilihan yang telah terlatih sejak era Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kotaku. Akan tetapi, terdapat beberapa anggota tim lainnya yang terbilang masih baru dan baru pertama kali menjalankan program pembangunan seperti Gerbang Cahayaku ini. Walaupun demikian, namun mereka dinilai memiliki potensi untuk dapat mengelola program besar ini dengan baik.

Apabila pada zaman PNPM terdapat pendamping desa yang ditunjuk secara langsung untuk membantu peningkatan kapasitas sekaligus mengawasi kinerja BKM, maka dalam pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku ini semua anggota Tim Sinar didorong untuk belajar secara mandiri. Anggaran yang minim tidak dapat mencukupi apabila dialokasikan untuk mengadakan kegiatan seperti penyuluhan dan pelatihan dengan mendatangkan ahli dari luar. Di sisi lain, pembekalan yang dari pihak Disperkim juga hanya diberikan pada awal kegiatan saja.

Di samping belajar secara mandiri, Tim Sinar juga mendapat bantuan dari BKM Desa Pataruman yang pernah mengelola program revitalisasi kawasan kumuh di desanya. Seperti yang pihak BKM dalam bahwa Tim Sinar sempat mendapat bimbingan oleh BKM Desa Pataruman berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dalam merealisasikan program yang hampir sama. Bahkan hingga saat pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku berlangsung juga, BKM Desa Pataruman masih terbuka apabila Tim Sinar memerlukan bantuan. Hal ini tentunya merupakan buah dari hubungan baik yang dibangun antar BKM selama bertahun-tahun sehingga diantara BKM Desa Tanjungsari dan BKM Desa Pataruman memiliki kedekatan tersendiri yang mendorongnya untuk melakukan tolong menolong.

Aksi Kolektif

Salah satu tujuan dari penerapan CDD dalam program pembangunan adalah untuk mendorong mobilisasi partisipasi masyarakat. World Bank menyoroti pelibatan masyarakat untuk mengawasi pemberian layanan dan menciptakan mekanisme untuk memperkuat partisipasi mereka yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan layanan dan

kohesi sosial. Pada program CDD, masyarakat menjadi pemilik, pelaksana, sekaligus penanggung jawab program [26].

Dalam pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku di Desa Tanjungsari, masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di Dusun Cireundeu dilibatkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian program dari awal hingga akhir. Kemudian Cohen dan Uphoff menerangkan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan; partisipasi dalam pelaksanaan; partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan partisipasi dalam evaluasi [27].

Di tahap awal, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan untuk menetapkan kebutuhan serta menyusun skala prioritas. Kegiatan musyawarah yang diselenggarakan pada tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan keluarga sasaran yang rumahnya akan direhab. Musyawarah seperti ini sangat diperlukan untuk mendapat hasil yang disepakati bersama dan untuk mencegah kecemburuan sosial di antara warga karena hanya akan ada dua rumah saja yang dibedah. Sebagai lembaga pimpinan kolektif, BKM bertanggung jawab dalam menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat bersama-sama saling bergotong royong untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas mulai dari Rutilahu, Jaling, Drainase, MCK, hingga RTP sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk materi maupun nonmateri. Mobilisasi ini juga diperkuat oleh dorongan tokoh-tokoh masyarakat, seperti RT; RW; dan Kepala Dusun serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Menurut penuturan beberapa anggota BKM yang juga menjadi anggota Tim Sinar, keterlibatan masyarakat Dusun Cireundeu dalam pembangunan tidak melihat usia atau jenis kelamin. Semua orang turut bergotong royong membantu di sela-sela luang pekerjaan sehari-harinya.

Menurut Widodo, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah gotong royong dalam bentuk tolong-menolong, yang dilakukan untuk kepentingan perseorangan pada saat dilanda kesusahan dan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kedua adalah gotong royong dalam bentuk kerja bakti, yang dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga keuntungannya pun dirasakan bersama [28]. Gotong royong bentuk pertama pada umumnya didasari oleh kedekatan emosional antar masyarakat seperti orang yang memiliki hubungan saudara, tetangga, atau kerabat dekat. Selain itu, gotong royong bentuk ini juga dapat didorong oleh adanya rasa empati yang tinggi ketika melihat orang lain kesusahan sehingga seseorang tergerak untuk

memberikan pertolongan. Hal ini terlihat pada saat proses pembangunan rutilahu, di mana kebanyakan orang yang membantu adalah tetangga dan kerabat dekat pemilik rumah. Mereka menyadari bahwa keluarga penerima manfaat pembangunan rutilahu merupakan orang yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Di samping itu, proses penetapan sasaran yang dilakukan secara musyawarah juga menunjukkan transparansi dalam proses demokrasi.

Selanjutnya untuk gotong royong bentuk kedua terlihat dari pembangunan beberapa fasilitas umum seperti MCK, RTP, Jaling, Drainase, dan lain sebagainya. Gotong royong bentuk ini pada umumnya berangkat dari kebutuhan dan kepentingan bersama diantara masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan pun dapat dirasakan bersama. Gotong royong dalam bentuk kerja bakti merupakan wujud kesadaran akan tanggung jawab masyarakat, terutama pada program CDD di mana pada akhirnya produk pembangunan akan sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Dengan begitu, seharusnya masyarakat dapat bekerja dengan lebih sungguh-sungguh seperti yang diharapkan oleh pihak Disperkim Kabupaten Garut.

Walaupun tingkat partisipasi masyarakat sudah tergolong tinggi, namun pada kenyataannya masih ada saja ditemui individu yang terlibat dalam kegiatan pembangunan bukan karena kesadaran dirinya, melainkan lebih dimotivasi oleh upah harian yang ditawarkan. Meskipun pada dasarnya masyarakat desa cenderung sudah menjadi pribadi yang bekerja keras, namun mereka perlu diberikan pendorong yang dapat menarik aktivitas mereka, sehingga cara dan irama bekerja yang mereka lakukan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan [28]. Bahkan beberapa masyarakat justru berpikiran bahwa Program Gerbang Cahayaku ini merupakan tanggung jawab BKM, sedangkan mereka hanya sebagai penerima saja. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat dari Program Gerbang Cahayaku itu sendiri meskipun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi baik oleh Disperkim maupun BKM.

Pada Program Gerbang Cahayaku sendiri, memang salah satu tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebagian besar pekerja bangunan yang dibayar melalui anggaran program harus berasal dari masyarakat setempat, khususnya mereka yang memang berstatus pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku ini, para pekerja akan dibayar dengan upah yang layak, namun dengan catatan mereka harus memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni sehingga kualitas bangunan yang dibangun nantinya dapat tetap terjamin. Untuk itu, BKM juga mendatangkan

ahli yang dipercaya mampu memimpin sekaligus melatih masyarakat yang turut terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan. Di samping pemberdayaan dalam konteks komunitas masyarakat, pemberdayaan di sini juga merujuk pada peningkatan kapabilitas individu agar lebih berdaya sehingga ke depannya ia akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Penjelasan tersebut selaras dengan pendapat Mardikanto & Soebianto bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan berbagai kejadian serta lembaga yang memengaruhi kehidupannya [29]. Dengan begitu, harapannya orang-orang tersebut dapat mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan bermodalkan keterampilan yang telah diajarkan.

Intervensi kompleks CDD memiliki arah perubahan yang tidak pasti sehingga hasil yang baik akan lebih memungkinkan apabila terdapat keterlibatan jangka panjang, sistem pemantauan yang baik dengan putara umpan balik, serta pendekatan implementasi yang adaptif. Sedangkan dalam realisasinya tidak jarang modal sosial yang terbentuk selama pelaksanaan program hanya bersifat sementara.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat belum mengalami perubahan perilaku secara signifikan seperti yang diharapkan sebagai dampak jangka panjang dari Program Gerbang Cahayaku. Dalam kurun waktu satu tahun, kondisi infrastruktur seperti MCK dan RTP dapat dikatakan masih baik, walau pada beberapa bagian sudah ada yang mulai tidak terawat. Selain itu, dari segi kebersihan kondisi di sekitar lokasi pembangunan telah mulai kotor kembali. Selain itu, yang cukup disayangkan adalah adanya penyalahgunaan secara fungsional infrastruktur yang ada, seperti RTP yang malah dijadikan tempat menjemur pakaian atau jagung.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama anggota BKM, dijelaskan bahwa pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat di minggu-minggu awal berjalan dengan baik. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat kembali lagi pada kebiasaan semulanya yang kurang menjaga lingkungan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Ketua Tim Pengawas yang kebetulan tinggal di lokasi yang dekat dengan RW 05 turut menuturkan bahwa karakter masyarakat sulit untuk diubah karena telah membudaya. Bagi beberapa orang memang mulai muncul kesadaran untuk lebih menjaga kebersihan dan memperhatikan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun melalui Program Gerbang Cahayaku. Namun, sebagian besar lainnya nampak belum memiliki rasa kepemilikan terhadap aset bersama sehingga perlu diingatkan secara terus menerus oleh BKM. Apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin kawasan

permukiman di Dusun Cireundeu akan kembali menjadi kumuh seperti semula. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi BKM, RT, RW, Kepala Dusun, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk selalu mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menciptakan kebiasaan yang lebih positif.

KESIMPULAN

Program Gerbang Cahayaku merupakan sebuah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terhadap permasalahan wilayah kumuh yang sangat rentan terjadi pada kawasan permukiman di perdesaan. Akan tetapi, lebih jauh lagi, tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan kemandirian pada masyarakat agar mereka lebih peka dan mampu menyelesaikan permasalahan di sekitar lingkungannya secara mandiri. Maka dari itu, program ini dirancang sebagai model pembangunan yang berfokus pada partisipasi dan tata kelola lokal seperti model *Community Driven Development* (CDD) yang memiliki karakteristik khusus.

Desentralisasi berkaitan dengan penyerahan wewenang dari Disperkim kepada BKM untuk mengelola kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kemudian demokratisasi berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola lokal dan proses pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Terakhir, aksi kolektif berkaitan dengan mobilisasi masyarakat yang terjadi secara inklusif untuk dapat terlibat langsung dalam seluruh tahap pada kegiatan pembangunan. Secara umum Program Gerbang Cahayaku yang diimplementasi di Desa Tanjungsari telah memenuhi ketiga aspek utama yang menjadi karakteristik model CDD. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts, Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.)," in *People: From Impoverishment to Empowerment*, New York: University Press, 1995.
- [2] D. Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press, 1991.
- [3] R. Prasetyanti and B. M. A. Kusuma, "Quintuple Helix dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa di Desa Panggunharjo, Yogyakarta)," *J. Borneo Adm.*, vol. 16, no. 3, pp. 337-360, 2020, doi: <https://doi.org/10.24258/>

- jba.v16i3.719.
- [4] T. R. Batten, *Training for Community Development: A Critical Study of Method*. Oxford University Press, 1969.
- [5] Portes, "On the Sociology of National Development: Theories and Issues," *Am. J. Sociol.*, 1976.
- [6] I. N. Beratha, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, 1982.
- [7] D. C. Korten, "Third generation NGO strategies: A key to people-centered development," *World Dev.*, vol. 15, pp. 145–159, Sep. 1987, doi: 10.1016/0305-750X(87)90153-7.
- [8] UNDP, "PARTICIPATORY DEVELOPMENT MODELS: The Cypriot Experience," 2013. [Online]. Available: <https://www.undp.org/cyprus/publications/participatory-development-models>
- [9] D. C. Korten and R. Klauss, *People-Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press, 1984.
- [10] A. A. J. Sidik and S. T. Raharjo, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat," in *Penguatan Kapasitas: Kumpulan Tulisan*, Unpad Press, 2016.
- [11] Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [12] A. Dasgupta and B. V.A., "Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia," *Dev. Change*, vol. 38, no. 2, pp. 229–249, 2007.
- [13] S. Wong and S. Guggenheim, "Community-Driven Development: Decentralization's Accountability Challenge," *East Asia Decentralizes*, pp. 253–267, 2005.
- [14] P. Dongier et al., "Community Driven Development," in *Sourcebook for Poverty Reduction Strategies*, Whashington DC: World Bank, 2002.
- [15] World Bank, "Measuring Impact of Community-Driven Development Projects on Gender—Toolkit for the Poverty Reduction Fund, Lao PDR," Whashington DC, 2011.
- [16] W. L. Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. Edinburgh Gate Harlow Essex: Pearson Education Limited., 2014.
- [17] J. W. Creswell, *Research Design*. Pustaka Pelajar, 2010.
- [18] R. Rosady, "Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi," in *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [19] Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publication, Inc, 2014.
- [20] R. C. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon. Inc, 1982.
- [21] Y. L. M. Sitorus, "Community Driven Development In Traditional Communities In Papua," *J. Reg. City Plan.*, vol. 28, no. 1, pp. 16–31, 2017.
- [22] J. Purnomo, "Pembangunan era Desentralisasi: Kedaulatan Ekonomi dan Kelestarian Alam yang Terabaikan," *J. Transformasi Glob.*, vol. 1, no. 1, pp. 75–89, 2016.
- [23] A. N. Chalia, "Peran BKM dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.," Universitas Negeri Semarang, 2015.
- [24] T. Wulandari and P. Solikhah, "Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Citra Dharma Mulya sebagai Basis Ekonomi Masalah di Desa Trimulyo Jetis Bantul," *JASNA J. Aswaja Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 95–118, 2022.

- [25] M. Holmlund and V. Rao, "Where and When is Community-Driven Development (CDD) Effective," *Development Impact*, 2021. <https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/where-and-when-community-driven-development-cdd-effective>
- [26] R. Resnawaty and R. S. Darwis, "Community Driven Development Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT. Pertamina Subang," *Share Soc. Work J.*, vol. 8, no. 1, pp. 64–73, 2018.
- [27] S. I. A. Dwiningsi, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [28] W. Widodo, M. Sutio, and S. Setioko, "Meningkatkan Motivasi Warga Terhadap Kesadaran Gotong Royong Sebagai Tujuan Pengembangan Desa di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan," *Community Dev. J.*, vol. 14, no. 1, pp. 732–735, 2023.
- [29] T. Mardikanto and P. Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, 2019.

